

PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PENGUATAN KARAKTER DAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DI KELURAHAN SELAT LANCANG

Fitri Puan, Mas Ganti, Syafrida Panjaitan, Putri Yusriani Sinambela, Nabila Khairun Amala, Yulia Syafira Gultom, Chairani, Fitri Dayana, Mutiara Indah Sari, Amrina Rosada
fitri_puan@staialhikmah.ac.id, masganti05@gmail.com, syafridapanjaitan125@gmail.com,
putriyusriani@gmail.com, nabilla202612@gmail.com, yuliasapira25@gmail.com,
chairani11223@gmail.com, fitridayana563@gmail.com, mindahsari42@gmail.com,
amrinarosada032@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Hikmah Kota Tanjungbalai

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords: Pendekatan partisipatif, Pendekatan partisipatif merupakan salah satu strategi yang dapat Penguatan Karakter, Kehidupan digunakan untuk memperkuat karakter dan meningkatkan kualitas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini menempatkan Modal Sosial. masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas, melaksanakan kegiatan, dan mengevaluasi hasil program.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendekatan partisipatif dalam penguatan karakter dan kehidupan sosial masyarakat dengan mengambil Kelurahan Selat Lancang sebagai konteks kajian. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan menelaah teori dan penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat, pendidikan karakter, pemberdayaan, modal sosial, dan kehidupan sosial. Analisis dilakukan melalui pengelompokan tema, perbandingan konsep, serta sintesis literatur untuk merumuskan keterkaitan antara partisipasi, pembiasaan nilai karakter, dan penguatan hubungan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memiliki potensi untuk mendukung pengembangan nilai tanggung jawab, kepedulian sosial, gotong royong, kedisiplinan, toleransi, dan kepercayaan antarwarga. Partisipasi yang bermakna juga dapat memperkuat modal sosial melalui pembentukan jaringan kerja sama, norma timbal balik, dan komunikasi yang terbuka. Namun, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis karena dipengaruhi oleh keterbukaan informasi, pemerataan kesempatan berpartisipasi, kualitas kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, dan kesinambungan program. Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, pendekatan partisipatif dapat dikembangkan melalui musyawarah warga, kegiatan sosial, gotong royong, pemberdayaan kelompok masyarakat, dan evaluasi program secara bersama. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan karakter dan kehidupan sosial memerlukan keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan serta dukungan kelembagaan yang inklusif. Karena kajian ini belum menggunakan data primer dari Kelurahan Selat Lancang, penerapan dan efektivitas strategi yang dibahas masih perlu diverifikasi melalui penelitian lapangan.

DOI:

<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeduca>

INTRODUCTION

Masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan karena keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kualitas karakter, hubungan sosial, dan kemampuan warga untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan. Kehidupan masyarakat yang harmonis membutuhkan kepedulian, tanggung jawab, kepercayaan, toleransi, dan kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi terciptanya lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat berhadapan dengan berbagai kebutuhan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh individu. Kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas umum, pelayanan sosial, kepedulian terhadap kelompok rentan, dan penyelesaian persoalan antarwarga membutuhkan kerja sama. Keberhasilan mengelola kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat membangun komunikasi, menyepakati aturan bersama, membagi tanggung jawab, serta mempertahankan komitmen. Dengan demikian, pembangunan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan karakter dan penguatan hubungan sosial.

Karakter merupakan salah satu aspek yang memengaruhi kualitas kehidupan bermasyarakat. Lickona (1991) menjelaskan bahwa pendidikan karakter mencakup pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa karakter tidak cukup dipahami sebagai pengetahuan mengenai nilai yang baik, tetapi juga mencakup kepekaan terhadap orang lain dan kemampuan menerapkan nilai dalam perilaku nyata. Dalam kehidupan masyarakat, tanggung jawab dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kesepakatan bersama, kepedulian melalui bantuan kepada warga

yang membutuhkan, sedangkan toleransi dapat ditunjukkan melalui penghargaan terhadap perbedaan pendapat.

Penguatan karakter juga tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada keluarga atau lembaga pendidikan formal. Lingkungan sosial memberikan pengalaman yang memengaruhi cara seseorang memahami norma, berinteraksi, dan bertindak. Ketika masyarakat membiasakan kerja sama, menghargai pendapat, menjaga fasilitas umum, dan membantu sesama, nilai-nilai tersebut memperoleh ruang untuk dipraktikkan. Sebaliknya, apabila interaksi sosial ditandai oleh kurangnya komunikasi, rendahnya kepercayaan, atau terbatasnya keterlibatan warga, proses pembiasaan nilai dapat menghadapi berbagai hambatan.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkuat karakter melalui kehidupan sosial adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pihak yang mempunyai peran dalam menentukan arah kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Partisipasi tidak hanya berarti hadir dalam pertemuan atau melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak lain, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam mengidentifikasi masalah, menyampaikan usulan, menentukan prioritas, melaksanakan program, dan mengevaluasi hasilnya.

Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang berbeda berdasarkan besarnya pengaruh warga terhadap pengambilan keputusan. Pandangan ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat tidak cukup dinilai dari jumlah peserta atau frekuensi kegiatan. Hal yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan dan apakah aspirasi mereka benar-benar dipertimbangkan. Oleh karena itu, kegiatan yang mengatasnamakan partisipasi perlu dilihat dari kualitas proses dan distribusi pengaruh di antara pihak-pihak

yang terlibat.

Cohen dan Uphoff (1980) juga menjelaskan bahwa partisipasi dapat berlangsung pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa warga dapat memiliki bentuk keterlibatan yang berbeda pada setiap tahap pembangunan. Seseorang mungkin aktif membantu pelaksanaan kegiatan, tetapi tidak dilibatkan dalam menentukan prioritas. Sebaliknya, warga dapat menyampaikan pendapat dalam musyawarah, tetapi tidak memperoleh informasi mengenai tindak lanjut keputusan. Oleh sebab itu, partisipasi yang bermakna memerlukan kesinambungan keterlibatan dari perencanaan hingga evaluasi.

Partisipasi masyarakat juga memiliki hubungan dengan pemberdayaan. Pemberdayaan menekankan pentingnya peningkatan kemampuan individu dan kelompok untuk mengenali kebutuhan, memanfaatkan sumber daya, mengembangkan kapasitas, dan mengambil peran dalam menentukan perubahan. Mansuri dan Rao (2013) menunjukkan bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat perlu memperhatikan konteks kelembagaan, ketimpangan kekuasaan, serta kualitas hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Artinya, pelibatan masyarakat tidak secara otomatis menghasilkan keputusan yang adil. Proses tersebut tetap membutuhkan keterbukaan, akuntabilitas, dan kesempatan yang memadai bagi berbagai kelompok warga.

Selain berhubungan dengan pemberdayaan, pendekatan partisipatif berkaitan erat dengan modal sosial. Putnam (2000) menjelaskan modal sosial melalui jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan yang mendukung kerja sama. Dalam masyarakat, modal sosial dapat berkembang melalui pengalaman saling membantu, pelaksanaan kesepakatan, keterbukaan informasi, dan keterlibatan dalam kegiatan bersama. Modal sosial yang kuat dapat membantu warga mengoordinasikan kegiatan, bertukar informasi, dan mengembangkan

dukungan sosial ketika menghadapi persoalan.

Meskipun demikian, modal sosial perlu dibangun secara inklusif. Hubungan yang erat dalam suatu kelompok tidak selalu menjamin bahwa seluruh warga memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Kelompok yang memiliki akses informasi dan pengaruh lebih besar dapat mendominasi kegiatan, sedangkan warga yang kurang terhubung dengan organisasi sosial berisiko tidak terwakili. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif perlu mendorong kerja sama lintas kelompok, keterbukaan terhadap perbedaan, dan pemerataan kesempatan dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, kajian mengenai pendekatan partisipatif penting untuk mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara kegiatan kemasyarakatan, pembentukan karakter, dan kehidupan sosial. Dokumentasi Pemerintah Kota Tanjungbalai (2017) mencatat keterlibatan TP PKK Kelurahan Selat Lancang dalam kegiatan Posyandu pada agenda supervisi kelurahan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Dokumentasi tersebut memberikan informasi historis mengenai keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pelayanan sosial. Namun, informasi tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan kondisi partisipasi masyarakat saat ini ataupun dampaknya terhadap karakter warga secara keseluruhan.

Kegiatan sosial, apabila dirancang secara partisipatif, dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antarwarga sekaligus membiasakan nilai-nilai positif. Kegiatan gotong royong, musyawarah, pelayanan kesehatan masyarakat, kepedulian terhadap kelompok rentan, dan aktivitas kepemudaan dapat memberikan kesempatan bagi warga untuk belajar bekerja sama, menghormati perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Akan tetapi, keberadaan kegiatan saja tidak cukup untuk membuktikan terjadinya penguatan karakter. Pengaruhnya perlu ditelaah

berdasarkan proses pelaksanaan, pengalaman warga, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan kegiatan.

Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan karakter menunjukkan bahwa keterlibatan lingkungan sosial dapat mendukung penanaman nilai gotong royong dan kepedulian sosial (Sjam, 2025). Sementara itu, kajian mengenai modal sosial dalam pendidikan karakter masyarakat Banjar memperlihatkan relevansi hubungan antara praktik sosial, nilai budaya, dan pembentukan karakter (Ruswinarsih et al., 2025). Meskipun konteks penelitian tersebut berbeda dari Kelurahan Selat Lancang, keduanya memberikan dasar konseptual untuk memahami bahwa nilai karakter dapat dipelajari melalui hubungan sosial dan praktik kolektif.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas pendekatan partisipatif sebagai strategi penguatan karakter dan kehidupan sosial masyarakat. Pembahasan diarahkan pada kualitas partisipasi, hubungan partisipasi dengan pembiasaan nilai karakter, peran modal sosial, fungsi kelembagaan masyarakat, hambatan pelaksanaan, dan strategi yang dapat dipertimbangkan dalam konteks Kelurahan Selat Lancang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual bagi pengembangan program masyarakat yang lebih inklusif serta menjadi dasar bagi penelitian lapangan berikutnya.

LITERATURE REVIEW

Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan Masyarakat

Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan kepentingan yang perlu dipertimbangkan. Partisipasi

memungkinkan masyarakat menyampaikan kebutuhan, merumuskan prioritas, memanfaatkan sumber daya, serta mengevaluasi program yang dilaksanakan. Cohen dan Uphoff (1980) menguraikan partisipasi pembangunan melalui beberapa dimensi, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Dimensi tersebut dapat digunakan untuk menilai proses partisipasi secara lebih menyeluruh. Partisipasi dalam pengambilan keputusan berhubungan dengan kesempatan masyarakat menentukan kebutuhan dan prioritas. Partisipasi dalam pelaksanaan berkaitan dengan kontribusi tenaga, pemikiran, waktu, atau sumber daya. Sementara itu, partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi berhubungan dengan pemerataan manfaat serta kemampuan masyarakat menilai keberhasilan kegiatan.

Arnstein (1969) menekankan bahwa kualitas partisipasi berhubungan dengan distribusi kekuasaan. Dalam kerangka tersebut, partisipasi tidak cukup dimaknai sebagai konsultasi atau pemberian informasi. Masyarakat perlu mempunyai pengaruh yang nyata terhadap keputusan. Pandangan ini relevan bagi program di tingkat kelurahan karena kegiatan yang disebut partisipatif dapat saja masih bersifat satu arah apabila seluruh keputusan ditentukan oleh penyelenggara.

Mansuri dan Rao (2013) menambahkan bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat perlu mempertimbangkan hubungan antara partisipasi, kelembagaan, dan kondisi sosial. Ketimpangan akses terhadap informasi, perbedaan kapasitas, serta dominasi kelompok tertentu dapat memengaruhi hasil partisipasi. Karena itu, pendekatan partisipatif perlu disertai mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan keterwakilan agar tidak hanya menguntungkan kelompok yang memiliki pengaruh lebih besar.

Berdasarkan pandangan tersebut, partisipasi masyarakat dalam artikel ini dipahami sebagai keterlibatan yang memberikan ruang kepada warga untuk

menyampaikan aspirasi, memengaruhi keputusan, berkontribusi dalam kegiatan, memanfaatkan hasil secara adil, dan melakukan evaluasi. Pemahaman ini menjadi dasar untuk menganalisis hubungan antara partisipasi dan penguatan kehidupan sosial masyarakat.

Penguatan Karakter dalam Kehidupan Sosial

Karakter merupakan aspek yang berkaitan dengan nilai, pertimbangan moral, dan perilaku seseorang ketika berhubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan masyarakat, karakter dapat tercermin melalui tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, toleransi, kerja sama, dan penghormatan terhadap kesepakatan. Nilai-nilai tersebut penting karena kehidupan bersama membutuhkan individu yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, tetapi juga memahami konsekuensi tindakannya terhadap orang lain.

Lickona (1991) mengemukakan bahwa pendidikan karakter mencakup pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Pengetahuan moral berkaitan dengan kemampuan memahami nilai dan mempertimbangkan tindakan yang tepat. Perasaan moral mencakup empati, kepedulian, dan komitmen terhadap kebaikan. Tindakan moral merupakan penerapan nilai dalam perilaku sehari-hari. Kerangka ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter membutuhkan pengalaman yang memungkinkan seseorang menghubungkan pemahaman dengan tindakan nyata.

Dalam lingkungan masyarakat, penguatan karakter dapat berlangsung melalui pengalaman ketika warga bekerja sama, menyelesaikan persoalan, mematuhi kesepakatan, dan memberikan bantuan kepada sesama. Misalnya, kegiatan menjaga kebersihan lingkungan dapat memberikan kesempatan mempraktikkan tanggung jawab. Musyawarah warga dapat menjadi ruang pembelajaran untuk mendengarkan pendapat dan menerima perbedaan. Kegiatan sosial dapat mengembangkan empati apabila dilaksanakan dengan

menghormati martabat penerima bantuan.

Sjam (2025) membahas pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan karakter dengan menekankan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Kajian tersebut mendukung pemahaman bahwa lingkungan masyarakat dapat menyediakan ruang pembiasaan nilai. Namun, penguatan karakter tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan terlaksananya suatu kegiatan. Penelitian perlu memperhatikan apakah warga benar-benar memperoleh pengalaman menjalankan tanggung jawab, mengembangkan kepedulian, dan bekerja sama secara konsisten.

Dengan demikian, penguatan karakter melalui pendekatan partisipatif perlu diarahkan pada proses yang memungkinkan warga memahami tujuan kegiatan, menjalankan tanggung jawab, merefleksikan pengalaman, dan menerapkan nilai dalam interaksi berikutnya. Karakter dalam konteks ini tidak hanya menjadi materi sosialisasi, tetapi menjadi bagian dari praktik kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan Sosial dan Modal Sosial

Kehidupan sosial masyarakat mencakup interaksi antarindividu, hubungan antarkelompok, norma, nilai, kerja sama, serta mekanisme penyelesaian persoalan bersama. Kualitas kehidupan sosial tidak hanya ditentukan oleh banyaknya interaksi, tetapi juga oleh kepercayaan, rasa aman, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan warga membangun kesepakatan. Kehidupan sosial yang sehat memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memperoleh dukungan, dan menyelesaikan konflik tanpa merusak hubungan antarwarga.

Putnam (2000) menjelaskan bahwa modal sosial berkaitan dengan jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan yang mendukung koordinasi serta kerja sama. Jaringan sosial memungkinkan warga bertukar informasi dan

memperoleh dukungan. Norma timbal balik mendorong kesediaan membantu dengan harapan hubungan saling mendukung dapat dipertahankan. Kepercayaan memungkinkan warga bekerja sama tanpa harus selalu mengawasi setiap tindakan pihak lain secara langsung.

Dalam konteks masyarakat kelurahan, modal sosial dapat berkembang melalui kegiatan warga, organisasi kemasyarakatan, hubungan bertetangga, kelompok pemuda, dan forum musyawarah. Ketika warga mempunyai pengalaman bekerja sama dan melihat bahwa kesepakatan dijalankan secara konsisten, kepercayaan dapat tumbuh. Sebaliknya, ketidakjelasan penggunaan sumber daya, pembagian manfaat yang tidak adil, atau kurangnya komunikasi dapat melemahkan kepercayaan.

Ruswinarsih et al. (2025) membahas hubungan antara praktik sosial masyarakat Banjar, modal sosial, dan pendidikan karakter. Kajian tersebut memberikan perspektif mengenai pentingnya praktik sosial dan nilai yang hidup dalam masyarakat dalam proses pembentukan karakter. Walaupun konteks budaya dan wilayahnya berbeda, penelitian tersebut memperkuat relevansi analisis mengenai hubungan antara kebiasaan kolektif dan karakter sosial.

Modal sosial perlu dikembangkan secara inklusif. Jaringan sosial yang kuat dalam satu kelompok dapat membantu anggotanya, tetapi belum tentu membuka akses bagi warga di luar kelompok tersebut. Karena itu, program partisipatif perlu memperluas kerja sama antarwarga dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam. Keberhasilan kehidupan sosial tidak cukup dinilai dari eratnya hubungan sebagian warga, tetapi juga dari kemampuan masyarakat membangun hubungan yang adil dan terbuka.

Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan memperkuat kemampuan warga untuk mengenali persoalan, menentukan pilihan,

memanfaatkan sumber daya, dan mengambil peran dalam perubahan sosial. Pemberdayaan tidak hanya berhubungan dengan pemberian bantuan, tetapi juga dengan pengembangan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan masyarakat mempertahankan kegiatan yang bermanfaat.

Mansuri dan Rao (2013) menekankan pentingnya memahami kondisi kelembagaan dan konteks sosial dalam program pembangunan partisipatif. Kegiatan yang dirancang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kapasitas masyarakat berisiko tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberdayaan perlu diawali dengan pemetaan kebutuhan, pengenalan sumber daya, dan pelibatan masyarakat dalam menentukan bentuk program.

Kelembagaan sosial berperan dalam mengorganisasi kegiatan, membangun komunikasi, membagi tanggung jawab, serta menghubungkan masyarakat dengan layanan yang tersedia. Kelembagaan tersebut dapat berupa organisasi kemasyarakatan, kelompok kepemudaan, kelompok kesehatan masyarakat, organisasi keagamaan, dan kelompok warga lainnya. Namun, keberadaan organisasi tidak secara otomatis menjamin partisipasi yang merata. Keterbukaan terhadap anggota baru, pembagian peran, transparansi, dan mekanisme evaluasi tetap diperlukan.

Dokumentasi Pemerintah Kota Tanjungbalai (2017) mengenai kegiatan Posyandu yang melibatkan TP PKK Kelurahan Selat Lancang merupakan contoh historis keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pelayanan sosial. Informasi tersebut dapat menjadi titik awal untuk menelusuri peran organisasi warga dalam kehidupan sosial setempat. Untuk mengetahui kondisi terkini, penelitian perlu memeriksa dokumen terbaru dan melakukan wawancara dengan pihak yang relevan.

Dengan demikian, pemberdayaan dan kelembagaan sosial perlu dipahami sebagai unsur pendukung partisipasi. Keduanya dapat membantu memperluas keterlibatan warga, tetapi efektivitasnya harus dinilai berdasarkan proses

pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, manfaat program, dan keberlanjutan kegiatan.

Penelitian Terdahulu dan Posisi Kajian

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, pembentukan karakter, dan modal sosial merupakan tema yang saling berhubungan, meskipun masing-masing dikaji dalam konteks yang berbeda.

Arnstein (1969) menjelaskan partisipasi warga berdasarkan tingkat pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan. Kontribusi penting penelitian tersebut adalah penegasan bahwa kualitas partisipasi perlu dilihat dari kekuasaan dan pengaruh warga, bukan hanya keterlibatan formal. Pemikiran ini dapat digunakan untuk menganalisis proses musyawarah dan pengambilan keputusan pada tingkat kelurahan.

Cohen dan Uphoff (1980) membahas partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan. Kerangka ini membantu menjelaskan bahwa keterlibatan warga dapat berbeda pada setiap tahap program. Dalam konteks artikel ini, kerangka tersebut digunakan untuk menyusun aspek-aspek yang perlu diperhatikan ketika menilai pendekatan partisipatif.

Lickona (1991) menekankan bahwa pendidikan karakter melibatkan pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral. Perspektif ini memberikan dasar untuk memahami bahwa penguatan karakter dalam masyarakat memerlukan pembiasaan nilai melalui tindakan nyata. Kegiatan sosial dapat menjadi ruang pembelajaran karakter apabila warga memperoleh kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab, mengembangkan empati, dan membangun kerja sama.

Putnam (2000) menjelaskan pentingnya jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan dalam mendukung tindakan kolektif. Pemikiran ini membantu

menerangkan hubungan antara partisipasi dan kehidupan sosial. Ketika warga memiliki pengalaman kerja sama yang positif, mereka dapat mengembangkan jaringan dan kepercayaan yang memudahkan kegiatan bersama.

Mansuri dan Rao (2013) mengkaji pembangunan yang melibatkan masyarakat secara kritis dengan memperhatikan kondisi kelembagaan, distribusi pengaruh, dan konteks sosial. Kajian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi tidak selalu menghasilkan manfaat secara merata. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif perlu memperhatikan keterwakilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Sjam (2025) membahas peran pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan karakter, terutama nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Penelitian tersebut relevan untuk menjelaskan potensi kegiatan masyarakat dalam mendukung pembiasaan karakter. Sementara itu, Ruswinarsih et al. (2025) mengkaji praktik *badingsanakan* sebagai modal sosial dalam pendidikan karakter masyarakat Banjar. Kajian tersebut menunjukkan relevansi hubungan antara nilai sosial, praktik kolektif, dan pembentukan karakter dalam konteks masyarakat tertentu.

Berdasarkan kajian tersebut, artikel ini menempatkan partisipasi masyarakat sebagai proses yang berpotensi menghubungkan penguatan karakter dan kehidupan sosial. Perbedaannya terletak pada fokus analisis yang diarahkan pada konteks Kelurahan Selat Lancang dengan mengintegrasikan dimensi partisipasi, pembiasaan karakter, modal sosial, dan kelembagaan masyarakat. Artikel ini belum menyajikan temuan empiris khusus mengenai kondisi warga Kelurahan Selat Lancang. Oleh karena itu, kontribusinya berada pada penyusunan kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar penelitian lapangan.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian

literatur. Kajian literatur dipilih karena tujuan artikel adalah menganalisis konsep dan penelitian terdahulu mengenai pendekatan partisipatif, penguatan karakter, pemberdayaan masyarakat, modal sosial, dan kehidupan sosial, kemudian menyusun sintesis yang relevan dengan konteks Kelurahan Selat Lancang. Kajian literatur memungkinkan penulis membandingkan berbagai perspektif dan mengidentifikasi konsep yang dapat digunakan untuk memahami persoalan yang dibahas.

Snyder (2019) menjelaskan bahwa kajian literatur dapat digunakan sebagai metodologi penelitian apabila proses pengumpulan, pemilihan, analisis, dan sintesis sumber dilakukan secara jelas. Kajian literatur bukan sekadar rangkuman berbagai tulisan, melainkan proses analitis untuk menghubungkan temuan dan gagasan dari sumber yang berbeda. Adlini et al. (2022) juga menjelaskan bahwa studi pustaka dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis, kemudian menyusun pemahaman berdasarkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

Sumber yang digunakan dalam artikel ini mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan dokumentasi resmi yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat, pendidikan karakter, modal sosial, pemberdayaan, dan konteks Kelurahan Selat Lancang. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya terhadap fokus kajian, kejelasan informasi bibliografis, serta keterkaitannya dengan konsep yang dianalisis. Karya klasik digunakan untuk membangun landasan teoretis, sedangkan penelitian yang lebih baru digunakan untuk memperkaya pembahasan mengenai pemberdayaan dan pembentukan karakter melalui kehidupan sosial.

Pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran kata kunci yang berkaitan dengan *community participation*, *participatory development*, *character education*, *social capital*, *community empowerment*, partisipasi masyarakat,

penguatan karakter, dan kehidupan sosial. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema utama, yaitu pendekatan partisipatif, pendidikan karakter, modal sosial, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, dan penelitian terdahulu.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah membaca sumber untuk mengidentifikasi konsep dan gagasan yang relevan dengan fokus artikel. Tahap kedua adalah mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang telah ditentukan. Tahap ketiga adalah membandingkan pandangan para penulis untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan hubungan antarkonsep. Tahap keempat adalah menyusun sintesis yang menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dapat berhubungan dengan penguatan karakter dan kehidupan sosial. Tahap terakhir adalah merumuskan implikasi konseptual dan strategi yang dapat dipertimbangkan dalam konteks Kelurahan Selat Lancang.

Dokumentasi Pemerintah Kota Tanjungbalai (2017) digunakan sebagai sumber pendukung untuk memberikan konteks historis mengenai keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam kegiatan Posyandu di Kelurahan Selat Lancang. Dokumen tersebut tidak digunakan sebagai bukti mengenai kondisi partisipasi masyarakat saat ini ataupun sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa program tertentu telah berhasil memperkuat karakter warga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan data primer dari wawancara, observasi, atau dokumentasi kegiatan terbaru di Kelurahan Selat Lancang. Oleh karena itu, hasil kajian merupakan sintesis teoretis dan analisis kontekstual, bukan laporan temuan empiris lapangan. Untuk penelitian lanjutan, data dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan aparatur kelurahan, pengurus lingkungan, tokoh masyarakat, pengurus organisasi kemasyarakatan, kelompok pemuda, dan warga. Data

wawancara dapat dipadukan dengan observasi kegiatan serta dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk partisipasi, pengalaman warga, dan hambatan yang dihadapi.

RESULT AND DISCUSSION

Pendekatan Partisipatif sebagai Dasar Penguatan Kehidupan Sosial

Berdasarkan sintesis literatur, pendekatan partisipatif dapat menjadi dasar penguatan kehidupan sosial karena menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, menyampaikan kebutuhan, menyusun kesepakatan, dan bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan. Partisipasi memungkinkan masyarakat mengembangkan rasa memiliki terhadap kegiatan yang dirancang bersama. Ketika warga merasa bahwa pendapatnya didengar dan kontribusinya dihargai, mereka mempunyai kesempatan lebih besar untuk membangun komitmen terhadap kegiatan kolektif.

Arnstein (1969) menegaskan bahwa kualitas partisipasi perlu dilihat dari pengaruh warga terhadap keputusan. Dalam konteks kehidupan kelurahan, masyarakat seharusnya tidak hanya dilibatkan ketika kegiatan akan dilaksanakan, tetapi juga ketika masalah diidentifikasi dan prioritas ditentukan. Pelibatan sejak awal memungkinkan program disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan memberi ruang kepada warga untuk mengusulkan alternatif penyelesaian.

Cohen dan Uphoff (1980) memperkuat pemahaman tersebut dengan membagi partisipasi ke dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Berdasarkan kerangka tersebut, kegiatan kemasyarakatan dapat dianalisis bukan hanya berdasarkan keterlaksanaan, tetapi juga berdasarkan proses yang melatarbelakanginya. Misalnya, kegiatan kebersihan lingkungan tidak cukup dinilai dari terlaksananya kerja bakti. Penilaian juga

perlu mencakup apakah warga dilibatkan dalam menentukan lokasi prioritas, apakah pembagian tugas disepakati bersama, dan apakah hasil kegiatan dievaluasi.

Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis kegiatan sosial yang benar-benar dilaksanakan masyarakat. Bentuk kegiatan perlu diidentifikasi melalui penelitian lapangan agar tidak hanya didasarkan pada asumsi. Peneliti dapat memeriksa bagaimana warga memperoleh informasi, siapa yang mengusulkan kegiatan, bagaimana keputusan dibuat, serta sejauh mana kelompok masyarakat yang berbeda memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi.

Pendekatan partisipatif juga dapat membantu memperkuat hubungan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Pemerintah kelurahan dapat berperan sebagai fasilitator yang menyediakan informasi, membantu koordinasi, dan memastikan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, masyarakat dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan lingkungan dan pengalaman yang mereka hadapi. Hubungan tersebut perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Namun, partisipasi tidak selalu menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik secara otomatis. Apabila proses pengambilan keputusan didominasi kelompok tertentu atau informasi hanya tersedia bagi sebagian warga, kegiatan yang disebut partisipatif dapat memperkuat ketimpangan. Oleh sebab itu, keterbukaan, pemerataan kesempatan, dan keterwakilan menjadi syarat penting agar partisipasi benar-benar mendukung kehidupan sosial yang inklusif (Mansuri & Rao, 2013).

Partisipasi Masyarakat dalam Penguatan Karakter

Partisipasi masyarakat memiliki potensi untuk mendukung penguatan karakter karena kegiatan bersama memberikan kesempatan bagi warga mempraktikkan

nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tanggung jawab dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang telah disepakati. Kepedulian sosial dapat ditunjukkan melalui perhatian terhadap kebutuhan tetangga. Kedisiplinan dapat dibangun melalui komitmen terhadap jadwal dan kesepakatan. Sementara itu, toleransi dapat dipraktikkan melalui penghormatan terhadap perbedaan pendapat.

Kerangka Lickona (1991) menjelaskan bahwa penguatan karakter membutuhkan hubungan antara pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Dalam kehidupan masyarakat, pengetahuan mengenai pentingnya gotong royong perlu disertai kesediaan untuk membantu dan tindakan nyata dalam kegiatan bersama. Demikian pula, pemahaman mengenai pentingnya toleransi perlu diwujudkan dalam perilaku yang menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapat.

Kegiatan partisipatif dapat dirancang untuk menghubungkan ketiga unsur tersebut. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pengelola dapat menjelaskan tujuan dan nilai yang ingin dikembangkan. Selama kegiatan, warga memperoleh kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab dan bekerja sama. Setelah kegiatan, evaluasi dapat digunakan untuk membahas pengalaman, kesulitan, dan pelajaran yang dapat diterapkan pada kegiatan selanjutnya. Proses refleksi tersebut membantu menghubungkan kegiatan praktis dengan pembelajaran karakter.

Sjam (2025) menunjukkan relevansi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung nilai gotong royong dan kepedulian sosial dalam konteks pendidikan karakter. Meskipun kajian tersebut berfokus pada pendidikan sekolah dasar, gagasannya dapat digunakan sebagai dasar konseptual untuk memahami peran lingkungan sosial dalam pembiasaan nilai. Pengembangan karakter melalui kegiatan masyarakat perlu tetap disesuaikan dengan karakteristik warga dan persoalan yang dihadapi.

Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, kegiatan sosial dapat menjadi sarana penguatan karakter apabila masyarakat benar-benar terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Namun, artikel ini belum memiliki bukti lapangan untuk menyatakan bahwa karakter warga telah meningkat melalui kegiatan tertentu. Untuk membuktikan hal tersebut, penelitian perlu mengamati perilaku warga secara lebih mendalam, membandingkan pandangan berbagai informan, dan menelusuri keberlanjutan perubahan perilaku.

Selain itu, penilaian karakter harus mempertimbangkan keadaan sosial warga. Ketidakhadiran seseorang dalam kegiatan tidak selalu menunjukkan kurangnya tanggung jawab atau kepedulian. Pekerjaan, kondisi kesehatan, keterbatasan waktu, dan tanggung jawab keluarga dapat memengaruhi partisipasi. Oleh karena itu, penguatan karakter perlu dilakukan melalui pendekatan yang mendidik dan memberdayakan, bukan melalui penilaian moral yang mengabaikan kondisi individu.

Gotong Royong sebagai Praktik Kerja Sama dan Solidaritas

Gotong royong merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dapat mempertemukan kepentingan individu dengan kebutuhan kolektif. Dalam kehidupan masyarakat, gotong royong dapat berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, perawatan fasilitas umum, dukungan terhadap kegiatan sosial, dan bantuan kepada warga yang mengalami kesulitan. Kegiatan tersebut dapat menjadi ruang pembelajaran mengenai tanggung jawab bersama dan solidaritas. Gotong royong yang dilaksanakan secara partisipatif tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga pada proses yang memungkinkan setiap warga memberikan kontribusi. Pembagian tugas yang jelas, penghargaan terhadap kemampuan masing-masing, dan komunikasi yang terbuka dapat membantu menciptakan pengalaman kerja sama yang positif. Sebaliknya, apabila kegiatan hanya bergantung pada kelompok tertentu atau dilakukan

melalui tekanan sosial, partisipasi berisiko tidak mencerminkan kesadaran dan kesepakatan bersama.

Dalam kerangka Lickona (1991), gotong royong dapat menjadi ruang praktik tindakan moral karena melibatkan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Nilai tersebut dapat berkembang ketika warga memahami tujuan kegiatan, merasakan pentingnya kontribusi orang lain, dan menjalankan tanggung jawab sesuai kemampuan. Dengan demikian, gotong royong memiliki dimensi praktis sekaligus pendidikan karakter.

Kegiatan gotong royong perlu dirancang dengan memperhatikan kondisi warga. Tidak semua warga mempunyai kemampuan atau waktu yang sama untuk berpartisipasi secara fisik. Oleh karena itu, kontribusi dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing, misalnya melalui bantuan koordinasi, penyediaan informasi, dukungan logistik, atau bentuk kontribusi lain yang relevan. Pendekatan ini membantu memperluas partisipasi tanpa menjadikan kegiatan sebagai beban yang tidak proporsional.

Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, gotong royong dapat dipertimbangkan sebagai salah satu strategi penguatan kehidupan sosial apabila sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. Penelitian lapangan perlu menggali jenis kegiatan yang dilakukan, pihak yang terlibat, mekanisme pembagian tugas, serta pandangan warga mengenai manfaatnya. Data tersebut akan membantu menjelaskan apakah gotong royong berfungsi sebagai kegiatan rutin, sarana penyelesaian persoalan, atau ruang pembentukan hubungan sosial.

Kepedulian Sosial dan Dukungan terhadap Kelompok Rentan

Kepedulian sosial merupakan kemampuan mengenali kebutuhan orang lain dan memberikan respons yang sesuai. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepedulian dapat diwujudkan melalui dukungan kepada warga lanjut usia, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, anak-anak, penyandang disabilitas, dan

kelompok lain yang memerlukan perhatian. Bentuk dukungan dapat berupa bantuan langsung, penyampaian informasi mengenai layanan, pendampingan, atau koordinasi dengan lembaga yang berwenang.

Pendekatan partisipatif dapat membantu membangun kepedulian sosial melalui proses identifikasi kebutuhan yang melibatkan masyarakat. Warga sering kali memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan dan kebutuhan yang tidak selalu terlihat dalam data administratif. Pelibatan masyarakat dapat membantu mengenali persoalan, menentukan prioritas bantuan, dan menyusun mekanisme dukungan yang sesuai. Namun, proses tersebut perlu menjaga privasi dan martabat warga yang membutuhkan bantuan.

Putnam (2000) menjelaskan pentingnya jaringan sosial dan norma timbal balik dalam mendukung kerja sama. Dalam konteks kepedulian sosial, jaringan warga dapat membantu penyebaran informasi, koordinasi bantuan, dan pengembangan dukungan ketika seseorang menghadapi kesulitan. Norma timbal balik juga dapat mendorong kesediaan warga untuk membantu tanpa mengharapkan keuntungan langsung.

Meskipun demikian, kegiatan bantuan sosial perlu dilaksanakan secara transparan dan adil. Informasi mengenai kriteria penerima bantuan harus jelas, sementara proses penentuan penerima perlu menghindari diskriminasi dan konflik kepentingan. Bantuan juga sebaiknya tidak menjadikan penerima sebagai objek publikasi yang merendahkan martabat mereka. Prinsip penghormatan terhadap manusia merupakan bagian penting dari penguatan karakter sosial.

Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, strategi kepedulian sosial dapat dirancang setelah kebutuhan masyarakat dan program yang sudah ada dipetakan. Penguatan kegiatan tidak harus selalu dilakukan dengan membentuk organisasi baru. Apabila sudah terdapat kelembagaan atau mekanisme dukungan yang berfungsi, upaya dapat diarahkan pada

peningkatan koordinasi, transparansi, dan keterlibatan warga.

Modal Sosial dan Kepercayaan Antarwarga

Modal sosial merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena mendukung kemampuan warga membangun kerja sama. Putnam (2000) menjelaskan bahwa jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan dapat membantu masyarakat mengoordinasikan tindakan kolektif. Dalam kegiatan partisipatif, modal sosial dapat berkembang ketika warga memperoleh pengalaman bekerja sama, berbagi informasi, dan melaksanakan kesepakatan secara konsisten.

Kepercayaan antarwarga tidak terbentuk hanya melalui ajakan untuk bersatu. Kepercayaan berkembang melalui pengalaman ketika warga merasa bahwa informasi disampaikan secara terbuka, tanggung jawab dijalankan, dan keputusan dibuat secara adil. Jika masyarakat melihat bahwa kontribusi mereka dihargai dan hasil kegiatan dapat dipertanggungjawabkan, peluang untuk mempertahankan kerja sama dapat meningkat.

Sebaliknya, kepercayaan dapat melemah ketika keputusan tidak dijelaskan, pembagian tugas dianggap tidak adil, atau manfaat kegiatan hanya dirasakan oleh sebagian kelompok. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif perlu menyediakan mekanisme komunikasi dan evaluasi yang jelas. Pengelola kegiatan perlu memberikan penjelasan mengenai tujuan program, sumber daya yang digunakan, pembagian tanggung jawab, dan hasil yang telah dicapai.

Modal sosial juga harus dibangun melalui hubungan lintas kelompok. Hubungan yang erat dalam kelompok tertentu dapat memberikan dukungan kepada anggotanya, tetapi kehidupan sosial yang inklusif membutuhkan keterbukaan terhadap warga di luar kelompok tersebut. Kegiatan bersama dapat dirancang agar warga dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda memperoleh kesempatan berinteraksi dan bekerja sama.

Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, penelitian mengenai modal sosial dapat diarahkan pada pengalaman warga dalam memperoleh bantuan, menyelesaikan persoalan, mengikuti kegiatan, dan berkomunikasi dengan pengurus lingkungan. Penelitian juga dapat menelusuri apakah warga merasa aman menyampaikan kritik dan apakah keputusan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, modal sosial dapat dianalisis melalui pengalaman konkret, bukan hanya melalui penilaian umum mengenai kerukunan masyarakat.

Peran Musyawarah dalam Membangun Partisipasi

Musyawarah merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengembangkan partisipasi apabila warga mempunyai kesempatan menyampaikan pendapat dan memengaruhi keputusan. Musyawarah dapat membantu masyarakat mengenali persoalan bersama, membandingkan alternatif, menetapkan prioritas, dan membagi tanggung jawab. Namun, kualitas musyawarah bergantung pada keterbukaan proses dan tindak lanjut terhadap hasilnya.

Arnstein (1969) mengingatkan bahwa partisipasi perlu dinilai dari tingkat pengaruh warga. Dalam musyawarah, hal tersebut dapat diamati melalui kesempatan peserta mengusulkan agenda, menyampaikan kritik, mengajukan alternatif, dan memperoleh penjelasan mengenai keputusan. Jika warga hanya diminta menyetujui keputusan yang telah ditetapkan, ruang partisipasi mereka masih terbatas.

Musyawarah yang inklusif memerlukan informasi yang dapat dipahami, waktu yang memungkinkan warga hadir, aturan berbicara yang adil, dan dokumentasi hasil keputusan. Pengurus dapat menyampaikan agenda sebelum pertemuan, mencatat usulan, menjelaskan alasan keputusan, serta menginformasikan tindak lanjut kepada masyarakat. Proses tersebut dapat membantu meningkatkan

kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman.

Dari sudut pandang penguatan karakter, musyawarah merupakan ruang untuk mempraktikkan sikap menghargai pendapat, mengendalikan emosi, mendengarkan orang lain, dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan. Nilai-nilai tersebut tidak terbentuk hanya karena pertemuan diselenggarakan. Pengelola perlu memastikan bahwa setiap peserta diperlakukan secara adil dan bahwa perbedaan pandangan tidak menjadi alasan untuk mengecualikan seseorang dari proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, penelitian dapat memeriksa proses musyawarah yang benar-benar berlangsung, komposisi peserta, bentuk usulan, respons terhadap pendapat yang berbeda, dan tindak lanjut keputusan. Informasi tersebut dapat membantu menilai apakah musyawarah berfungsi sebagai ruang partisipasi substantif atau hanya sebagai sarana penyampaian informasi.

Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Kehidupan Sosial

Kelembagaan masyarakat dapat membantu mengorganisasi kegiatan, menghubungkan warga dengan layanan, dan mempertahankan kesinambungan program. Organisasi kemasyarakatan, kelompok kepemudaan, kelompok kesehatan masyarakat, dan kelompok warga dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi serta membagi tanggung jawab. Namun, efektivitas kelembagaan perlu dinilai berdasarkan fungsi dan kualitas keterlibatannya, bukan hanya berdasarkan keberadaan organisasi secara formal. Dokumentasi Pemerintah Kota Tanjungbalai (2017) mengenai kegiatan Posyandu yang melibatkan TP PKK Kelurahan Selat Lancang memberikan konteks historis bahwa unsur kelembagaan masyarakat pernah tercatat dalam kegiatan pelayanan sosial di wilayah tersebut. Dokumentasi ini dapat digunakan sebagai petunjuk awal untuk menelusuri peran organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan warga. Akan tetapi, penelitian lebih lanjut

diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan dan peran kelembagaan tersebut pada masa sekarang.

Kelembagaan masyarakat dapat mendukung penguatan karakter apabila proses organisasinya mencerminkan nilai yang ingin dibangun. Organisasi yang mendorong tanggung jawab perlu memiliki pembagian tugas yang jelas. Organisasi yang ingin membangun kepercayaan perlu menyampaikan informasi secara terbuka. Organisasi yang mengembangkan toleransi perlu memberikan ruang bagi perbedaan pendapat. Dengan demikian, karakter tidak hanya menjadi tema kegiatan, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola organisasi.

Kelembagaan sosial juga membutuhkan regenerasi dan pengembangan kapasitas. Ketergantungan pada satu atau dua orang dapat menghambat kesinambungan program ketika terjadi pergantian pengurus. Oleh karena itu, pembagian tugas, dokumentasi kegiatan, pelibatan anggota baru, dan evaluasi perlu menjadi bagian dari pengelolaan organisasi. Kapasitas kelembagaan yang baik dapat membantu masyarakat mempertahankan kegiatan dan menyesuaikannya dengan perubahan kebutuhan.

Hambatan dalam Penerapan Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif memiliki potensi untuk memperkuat kehidupan sosial, tetapi penerapannya dapat menghadapi berbagai hambatan. Hambatan berikut merupakan kategori analisis berdasarkan literatur dan belum dapat dinyatakan sebagai kondisi yang benar-benar terjadi di Kelurahan Selat Lancang tanpa penelitian lapangan.

Hambatan pertama adalah keterbatasan akses terhadap informasi. Warga yang tidak memperoleh informasi tepat waktu dapat kehilangan kesempatan untuk mengikuti musyawarah atau menyampaikan usulan. Oleh karena itu, informasi mengenai jadwal, agenda, tujuan, dan hasil kegiatan perlu disampaikan melalui

saluran yang dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat.

Hambatan kedua adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Pekerjaan, tanggung jawab keluarga, kondisi kesehatan, dan kebutuhan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kehadiran tidak selalu mencerminkan rendahnya kepedulian. Pengelola perlu mempertimbangkan jadwal yang sesuai dan bentuk kontribusi yang lebih fleksibel.

Hambatan ketiga adalah dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Apabila hanya sebagian warga yang memiliki pengaruh, kebutuhan kelompok lain dapat terabaikan. Arnstein (1969) dan Mansuri dan Rao (2013) menunjukkan pentingnya memperhatikan distribusi pengaruh dan konteks kelembagaan dalam proses partisipatif. Mekanisme musyawarah yang adil dan keterbukaan informasi dapat membantu mengurangi risiko dominasi.

Hambatan keempat adalah kurangnya kesinambungan program. Kegiatan yang bergantung pada individu tertentu, tidak memiliki pembagian tugas yang jelas, atau tidak dievaluasi secara berkala berisiko berhenti ketika menghadapi perubahan kepemimpinan dan sumber daya. Keberlanjutan memerlukan perencanaan, pembagian tanggung jawab, dokumentasi, serta mekanisme regenerasi.

Hambatan kelima adalah tidak adanya evaluasi yang memadai. Jumlah kegiatan dan peserta belum cukup untuk menunjukkan bahwa karakter atau hubungan sosial telah mengalami perubahan. Evaluasi perlu menilai proses, keluaran, dan hasil. Proses mencakup keterbukaan dan pemerataan partisipasi; keluaran mencakup kegiatan yang terlaksana; sedangkan hasil dapat mencakup perubahan pengalaman kerja sama, kualitas komunikasi, dan kepercayaan warga yang dibuktikan melalui data.

Hambatan keenam adalah ketidaksesuaian antara program dan kebutuhan masyarakat. Program yang dirancang tanpa pemetaan kebutuhan berisiko tidak

memperoleh dukungan atau hanya bermanfaat bagi sebagian kelompok. Oleh karena itu, identifikasi masalah dan penentuan prioritas perlu dilakukan bersama warga, disertai pemeriksaan terhadap ketersediaan sumber daya dan kelayakan pelaksanaan.

Strategi Penguatan Karakter dan Kehidupan Sosial di Kelurahan Selat Lancang

Berdasarkan sintesis literatur, strategi penguatan karakter dan kehidupan sosial masyarakat dapat diarahkan pada beberapa upaya. Strategi ini merupakan rekomendasi konseptual yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata Kelurahan Selat Lancang.

Pertama, memperkuat musyawarah warga yang terbuka dan inklusif. Musyawarah perlu memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan, menyampaikan usulan, dan mengevaluasi keputusan. Hasil pertemuan sebaiknya didokumentasikan dan disampaikan kembali kepada warga agar proses pengambilan keputusan dapat dipantau. Strategi ini sejalan dengan pemikiran Arnstein (1969) bahwa partisipasi perlu memberi pengaruh nyata terhadap keputusan.

Kedua, mengembangkan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sebelum menentukan program, pengelola dapat melakukan pemetaan kebutuhan dan sumber daya melalui diskusi, wawancara, atau survei sederhana. Proses tersebut dapat membantu mengidentifikasi persoalan prioritas, kelompok yang memerlukan dukungan, dan kontribusi yang dapat diberikan warga. Dengan demikian, program tidak hanya ditentukan berdasarkan asumsi penyelenggara.

Ketiga, menjadikan kegiatan bersama sebagai ruang pembiasaan karakter. Gotong royong, kegiatan lingkungan, bantuan sosial, dan musyawarah dapat disertai pembagian tanggung jawab serta evaluasi mengenai nilai yang

dipraktikkan. Kerangka Lickona (1991) dapat digunakan untuk memahami hubungan antara pemahaman nilai, kepekaan moral, dan tindakan. Dengan demikian, penguatan karakter dihubungkan dengan pengalaman nyata.

Keempat, memperluas kerja sama antar kelompok masyarakat. Kegiatan dapat dirancang untuk mempertemukan warga dengan latar belakang, usia, dan pengalaman yang beragam. Upaya tersebut penting agar modal sosial tidak hanya memperkuat hubungan di dalam kelompok yang sudah dekat, tetapi juga membangun jaringan kerja sama yang lebih luas (Putnam, 2000).

Kelima, memperkuat kapasitas organisasi kemasyarakatan. Peningkatan kapasitas dapat meliputi perencanaan kegiatan, pembagian tugas, pengelolaan informasi, dokumentasi, dan evaluasi. Organisasi yang mempunyai mekanisme kerja yang jelas akan lebih mudah mempertahankan kegiatan dan melibatkan anggota baru.

Keenam, mengembangkan partisipasi pemuda. Kelompok pemuda perlu diberi ruang untuk menyampaikan gagasan, menyusun kegiatan, dan mengevaluasi hasilnya. Bentuk kegiatan sebaiknya ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan minat kelompok muda. Keberhasilan tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah kegiatan, tetapi juga berdasarkan pengalaman kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerja sama yang berkembang.

Ketujuh, membangun evaluasi partisipatif. Warga perlu dilibatkan dalam menilai apakah program telah mencapai tujuan, apakah manfaatnya dirasakan secara adil, dan perubahan apa yang perlu dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui pertemuan berkala, diskusi kelompok, wawancara, atau kuesioner sederhana. Hasil evaluasi perlu digunakan untuk memperbaiki program agar partisipasi tidak berhenti pada pemberian pendapat.

Implikasi Kajian bagi Pengembangan Program Masyarakat

Kajian ini menunjukkan bahwa penguatan karakter dan kehidupan sosial

sebaiknya tidak hanya diukur berdasarkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Jumlah kegiatan merupakan indikator keluaran, sedangkan penguatan karakter dan kualitas hubungan sosial merupakan hasil yang perlu diperiksa melalui indikator yang sesuai. Perbedaan tersebut penting agar program tidak mengklaim keberhasilan hanya karena kegiatan terlaksana.

Pada tingkat praktik, pemerintah kelurahan dan organisasi kemasyarakatan dapat menilai program melalui pertanyaan mengenai keterbukaan informasi, keterwakilan warga, pengaruh masyarakat terhadap keputusan, pembagian tanggung jawab, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Pertanyaan tersebut membantu menggeser perhatian dari pelaksanaan acara menuju kualitas proses partisipatif.

Dari sisi teoretis, artikel ini menghubungkan perspektif partisipasi masyarakat, pendidikan karakter, dan modal sosial. Teori partisipasi membantu menjelaskan bagaimana warga terlibat dalam keputusan. Teori pendidikan karakter menjelaskan bagaimana nilai dipahami dan dipraktikkan. Sementara itu, teori modal sosial menjelaskan bagaimana jaringan, norma, dan kepercayaan mendukung kerja sama. Penggabungan ketiga perspektif ini memberikan kerangka yang lebih luas untuk memahami hubungan antara partisipasi dan kehidupan sosial.

Bagi Kelurahan Selat Lancang, implikasi tersebut perlu diawali dengan pengumpulan data lokal. Penelitian lapangan dapat mengidentifikasi kegiatan yang sedang berlangsung, kelompok yang terlibat, hambatan partisipasi, dan pandangan warga mengenai manfaat program. Data tersebut akan membantu menentukan strategi yang sesuai dengan kondisi nyata, sekaligus mencegah penerapan program yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan partisipatif dapat dipandang sebagai proses yang berpotensi memperkuat karakter dan kehidupan sosial, tetapi efektivitasnya harus dinilai berdasarkan bukti. Keterbukaan, keadilan,

kesinambungan, dan kemampuan menyesuaikan program dengan kebutuhan warga menjadi unsur penting dalam pelaksanaannya.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Pendekatan partisipatif merupakan strategi yang relevan untuk menganalisis penguatan karakter dan kehidupan sosial masyarakat karena menempatkan warga sebagai pihak yang terlibat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Berdasarkan teori partisipasi, keterlibatan masyarakat tidak cukup dinilai melalui kehadiran atau jumlah kegiatan, tetapi perlu diperiksa berdasarkan kesempatan warga memengaruhi keputusan, keterbukaan informasi, pembagian tanggung jawab, dan pemerataan manfaat. Pemikiran Arnstein (1969) serta Cohen dan Uphoff (1980) menegaskan pentingnya kualitas dan kesinambungan partisipasi.

Partisipasi masyarakat berpotensi mendukung penguatan karakter melalui praktik tanggung jawab, kepedulian sosial, gotong royong, kedisiplinan, dan toleransi. Kerangka Lickona (1991) menunjukkan bahwa karakter mencakup pemahaman nilai, kepekaan moral, dan tindakan nyata. Oleh karena itu, kegiatan sosial perlu dirancang agar memberikan kesempatan kepada warga untuk mempraktikkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penguatan karakter tidak dapat dinyatakan berhasil hanya berdasarkan keberadaan kegiatan, melainkan harus dibuktikan melalui data yang relevan.

Kehidupan sosial masyarakat juga berhubungan dengan modal sosial berupa jaringan, norma timbal balik, dan kepercayaan. Modal sosial dapat mendukung kerja sama, pertukaran informasi, dan dukungan antarwarga, tetapi perlu dibangun secara inklusif agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Musyawarah yang terbuka, kelembagaan yang bertanggung jawab, dan evaluasi partisipatif merupakan beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat hubungan sosial.

Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, pendekatan partisipatif dapat dikembangkan melalui kegiatan sosial yang sesuai dengan kebutuhan warga, penguatan musyawarah, gotong royong, kepedulian terhadap kelompok rentan, pemberdayaan organisasi masyarakat, dan keterlibatan pemuda. Dokumentasi Pemerintah Kota Tanjungbalai (2017) mengenai keterlibatan TP PKK Kelurahan Selat Lancang dalam kegiatan Posyandu memberikan konteks historis mengenai kegiatan kelembagaan masyarakat, tetapi belum cukup untuk menjelaskan kondisi partisipasi masyarakat saat ini. Karena artikel ini menggunakan kajian literatur tanpa data primer, kesimpulan mengenai efektivitas pendekatan tersebut di Kelurahan Selat Lancang masih perlu diuji melalui penelitian lapangan.

Pemerintah Kelurahan Selat Lancang dan organisasi kemasyarakatan disarankan memperkuat proses partisipasi melalui musyawarah yang terbuka, pemetaan kebutuhan warga, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan evaluasi program secara berkala. Program perlu dirancang berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi dan memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat yang beragam untuk menyampaikan pendapat. Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban perlu menjadi bagian dari setiap kegiatan agar kepercayaan masyarakat dapat dipelihara.

Masyarakat diharapkan berpartisipasi sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing melalui penyampaian gagasan, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dukungan kepada warga yang membutuhkan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. Partisipasi sebaiknya dipahami sebagai kontribusi terhadap kepentingan bersama, bukan semata-mata kewajiban menghadiri kegiatan. Pengelola program juga perlu menghargai keterbatasan warga dan menyediakan bentuk kontribusi yang lebih fleksibel.

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian lapangan dengan

menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian perlu melibatkan aparatur kelurahan, pengurus lingkungan, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan warga dengan pengalaman yang beragam. Penelitian tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi yang berlangsung, nilai karakter yang dipraktikkan, kondisi modal sosial, faktor penghambat, serta manfaat program terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya data empiris, rekomendasi dapat disesuaikan dengan kondisi nyata Kelurahan Selat Lancang dan kesimpulan penelitian dapat disusun secara lebih kuat.

REFERENCES

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1>
- Pemerintah Kota Tanjungbalai. (2017, April 6). *Supervisi kelurahan oleh Tim 3 PKK*

Provinsi Sumatera Utara di Kota Tanjungbalai.

<https://tanjungbalai.org/agenda/supervisi-kelurahan-oleh-tim-3-pkk-provinsi-sumatera-utara-di-kota-tanjungbalai/>

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Ruswinarsih, S., Budimansyah, D., Wahyu, W., & Sauri, S. (2025). Badingsanakan as social capital in character education: A qualitative analysis on Banjar society. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 6(2). <https://doi.org/10.26418/jppkn.v6i2.94727>

Sjam, D. A. (2025). Peran pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.43153>

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Dokumentasi



